

PENGUJIAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI TERHADAP PERPPU NO. NO. 4 TAHUN 2009 DAN PERPPU NO. 4 TAHUN 2008)

NI'MATUL HUDA

Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jalan Cik Ditiro No. 1 Yogyakarta

ABSTRACT

Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) as a legal norm has no clarity in 1945 Constitution (UUD 1945), whether it can be juridically tested by judiciary or not. However, in the practice of state administration, Constitutional Court has tested Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) No. 4/2009 and Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) No. 4/2008. The problems that will be studied are: First, why did Constitutional Court test the two Government Regulation in Lieu of Laws (Perppu) above? Second, what is the legal status of both Laws (Perppu) after being tasted? This study is a juridical study using case approach method. The resources of this study consist of primary and secondary legal materials including legislations and Constitutional Court's decision concerning the problems being studied. The result of the study can be concluded as follows: First, Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) can cause the emergence of legal norms since its authorization and its power is as powerful as law. Because it can generate legitimate norm as Law (UU), Constitutional Court may test whether its material is contrary to 1945 Constitution (UUD 1945). Second, the legal status of Constitutional Court's decision on the proposal of testing the two Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) is legitimate because in testing the two Government Regulation in Lieu of Law (Perppu), Constitutional Court has not tested the main case filed by the petitioner as he or she is not eligible in legal standing to file for petition.

Key words: Government Regulation in Lieu of Law (Perppu), testing, Constitutional Court

I. PENDAHULUAN

Selama berjalannya pemerintahan Orde Baru belum pernah ada undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Agung atau lembaga peradilan manapun. Hal itu terjadi karena tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan pengujian undang-undang. Mahkamah Agung melalui UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung hanya diberi kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di

bawah undang-undang terhadap undang-undang. Dengan demikian undang-undang menjadi benar-benar tidak “tersentuh” mekanisme pengujian oleh lembaga manapun.

Namun setelah terjadi reformasi 1998, mulailah dilakukan amandemen UUD 1945 di tahun 1999-2002, termasuk di dalamnya mengamandemen bab kekuasaan kehakiman (Pasal 24 UUD 1945). Melalui amandemen Pasal 24 UUD 1945 lahirlah lembaga baru Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

UUD 1945 hasil amandemen secara tegas sudah mendisain distribusi kewenangan untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan (*judicial review*) dalam Pasal 24A ayat (1) untuk Mahkamah Agung (MA) dan Pasal 24C ayat (1) untuk MK. Menurut ketentuan Pasal 24A ayat (1) ditegaskan, “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, *menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang*, dan mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.” Kemudian dalam Pasal 24C ayat (1) ditegaskan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...*”

Perihal kewenangan MA tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), bahwa “Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”. Demikian pula di dalam Pasal 31 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, juga ditegaskan: “Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.” Kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut diatur lebih lanjut dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a ditegaskan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”